

Aceh Goes Open Source

Meski Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) saat ini masih dalam pembangunan ulang dan pemulihan setelah musibah besar berupa gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004, Gubernur NAD bertekad menjadikan NAD sebagai provinsi berbasis TI dan *open source*.

Keinginan Gubernur NAD, Irwandi Yusuf, itu tertuang dalam sebuah kesepakatan bersama antara Gubernur NAD dengan Menteri Riset dan Teknologi serta Rektor Universitas Syiah Kuala pada 27 Februari 2007 di Banda Aceh. Menristek Kusmayanto Kadiman pada saat bertemu dengan Gubernur NAD dan Rektor Unsyiah di kantor Gubernur juga menyatakan bahwa Unsyiah akan menjadi salah satu pusat pengembangan dan penyedia dukungan *Open Source Software*.

Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan Open Source Software di lingkungan Pemda NAD dan kesiapan SDM-nya, serta dukungan komunitas untuk menyukseskan Aceh Goes Open Source, kami telah mewawancarai beberapa pihak terkait, antara lain Kepala Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) NAD, beberapa administrator *network* dan sistem di lingkungan kantor gubernur, dan para aktivis Linux dan Open Source di Banda Aceh dan sekitarnya.

Linux di kantor Gubernur Aceh

Di kantor Gubernur atau Sekretariat Daerah Provinsi NAD, yang beralamat di Jln. Nyak Arif No. 1 Banda Aceh, kami berhasil menemui Bakhtiar Arrahman dari Biro Umum, Arif Arham dari Biro Pembangunan dan Tata Ruang, dan Helmy dari Biro Perlengkapan. Salah satu komputer di ruang server lantai dasar kantor ini terinstal Ubuntu. Sambil kami berdiskusi, Bakhtiar meng-copy empat DVD repository Ubuntu yang kami bawa dari Jakarta.

Menurut Arif, beberapa staf di kantor Sekretariat Daerah Provinsi NAD telah menggunakan Linux sebagai *desktop* kerja sejak 2003. Bakhtiar, Arif, dan Helmy menggunakan beberapa aplikasi desktop standar, seperti OpenOffice, Gimp, Gaim, Xmms, Xine, dan Firefox. Terdapat 15 PC desktop di kantor gubernur yang sudah terinstal Linux.

Sejak awal 2007 lalu, Linux mulai digunakan sebagai sistem operasi dua server di kantor Gubernur. Aplikasi dua server itu antara lain sebagai *gateway*, *proxy*, *server repository*, dan *server multimedia streaming*. Saat ini, Arif dan kawan-kawan sedang

mempelajari GIS (*Geographic Information System*) berbasis PHP dan MySQL di Linux. Mereka bersama BPDE dan BRR juga sedang mengembangkan aplikasi *e-procurement* untuk sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Provinsi NAD.

Linux di BPDE

BPDE atau Badan Pengelola Data Elektronik adalah semacam divisi teknologi informasi di tingkat daerah provinsi NAD, yang juga mengkoordinasi seluruh KPDE (Kantor Pengelola Data Elektronik) di tingkat kota dan kabupaten dalam wilayah NAD. Menurut Kepala BPDE NAD, Drs. H. Bakhtiar, telah ada 15 server yang dikelola BPDE berjalan di atas sistem operasi Linux, dan saat ini ada 10 komputer desktop Linux.

“Awalnya, sejak 2001 sistem operasi LINUX dipakai hanya untuk perangkat server yang berfungsi sebagai router, web hosting, DNS, mail server, dan lainnya. Kemudian pada tahun 2005 kami sudah mulai menggunakan Linux untuk PC desktop,” ujarnya.

Server-server Linux berada dalam sebuah ruangan khusus di lantai 2 gedung BPDE, Jln. T. Cot Plieng No. 48 Banda Aceh. Sistem informasi yang dijalankan bersama sistem operasi Linux adalah Kantaya (Kantor Maya) dan SIEDA (Sistem Informasi Eksekutif Daerah). Dua aplikasi itu hasil kerjasama antara BPDE Provinsi NAD dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).



Gubernur NAD menerima distro IGOS Nusantara dari Menristek.



Para aktivis Linux Pemda NAD di ruang server BPDE.



Website intranet kantor Gubernur Aceh.

Salah satu yang sedang dikembangkan bersama BRR adalah e-procurement. Aplikasi server lainnya sama dengan aplikasi yang banyak digunakan di Internet, seperti gateway, proxy, mail server, dan web server.

Alasan menggunakan Linux

Ketika ditanya apa alasan memilih Linux, tim BPDE NAD menjelaskan, antara lain karena server-server Linux dapat berjalan baik, stabil, dan aman. Semua komputer yang terinstal Linux di BPDE terbukti aman terhadap serangan virus. Selain itu, penggantian software dapat dilakukan secara legal dan berbiaya rendah.

Arif dan kawan-kawan di kantor Gubernur menambahkan bahwa *update* Linux lebih mudah. "Sebagai contoh, jika kami menggunakan Linux bisa bebas berkreasikan membuat tampilan desktop seperti KDE atau GNOME, dengan berbagai theme dan ikon," ungkap Arif penuh semangat.

Dukungan bisnis dan pemerintah

Seperti di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, dukungan bisnis atau perusahaan terhadap penggunaan Linux dan Free/Open Source Software di Aceh sangat bagus. Semua ISP dan perusahaan komputer dapat kerja sama secara baik dengan Pemda NAD dalam pemanfaatan Linux/FOSS di server dan desktop.

Menurut Kepala BPDE NAD, banyak faktor yang menunjang keberhasilan penggunaan Linux di NAD, antara lain:

- Pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini pucuk pimpinan tertinggi yaitu Gubernur dan Bupati/walikota untuk tingkat kab/kota sebagai pengambil kebijakan.

- Badan Pengelola Data Elektronik Provinsi NAD dan KPDE kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis bidang ICT dari kebijakan yang telah diambil oleh Gubernur untuk level provinsi dan bupati/walikota untuk level kab/kota.
- Pihak-pihak Institusi pendidikan sebagai "pabrik" penghasil SDM ICT.
- Pihak komunitas Linux seperti KPLI Aceh, dan lain-lain.
- Pihak ISP dan pengusaha penjual komputer atau penyedia jasa ICT lainnya.

Dukungan komunitas

Menurut Ketua KPLI Aceh, Zahrul Maizi, sejak terbentuknya kepengurusan baru pada 2006 lalu, KPLI Aceh memiliki program promosi ke sekolah, kampus, dan para pekerja di swasta dan pemerintah. KPLI Aceh juga siap memberikan dukungan teknis dan pelatihan-pelatihan agar Pemda NAD berhasil Goes Open Source.

Apa langkah selanjutnya?

Para aktivis Linux di BPDE dan Kantor Gubernur NAD telah menyusun beberapa langkah untuk memasyarakatkan Linux dan Open Source di kalangan pegawai pemda dan masyarakat luas. Di antaranya sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi sistem operasi Linux dan OSS kepada pengguna komputer di kantor dinas, badan, atau lembaga daerah dan masyarakat.
- Mengadakan pelatihan kepada pengguna di dinas/badan/lembaga daerah dan masyarakat dari berbagai level mulai dari operator, programmer, dan terakhir tingkat pengambil kebijakan.
- Melakukan sosialisasi dengan membagikan CD OS Linux.
- Melakukan penerapan sistem operasi Linux dan OSS di dinas/badan/lembaga daerah dalam lingkungan Provinsi NAD dan kabupaten/kota.

Rusmanto [rus@infolinux.co.id]

Serambi Mekah yang terus berbenah



Aceh adalah nama populer untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), yang merupakan Daerah Istimewa yang terletak di ujung barat laut pulau Sumatra. "Serambi Mekah" adalah sebutan untuk Aceh, karena ciri khas keislamannya yang sangat kuat, sehingga menjadi provinsi satu-satunya di Indonesia yang berdasar syariat Islam. Saat ini Aceh dipimpin oleh gubernur Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc dan wakil gubernur Muhammad Nazar, S.Ag, yang dipilih langsung oleh rakyatnya tahun lalu.

Menurut informasi di www.nad.go.id, Aceh memiliki 119 pulau, 73 sungai besar, dan 2 danau. Ibukota Aceh adalah Banda Aceh yang dulunya dikenali sebagai "Kutaradja". Aceh sebagai sebuah entitas etnis dan wilayah tertentu sangat berbeda dengan etnis atau wilayah lainnya di Indonesia. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang pluralistis dan "terbuka". Di daerah NAD, terdapat 8 sub-etnis, yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Kluet, Simeulu, Singkil, dan Tamiang. Saat ini terdapat 21 kota/kabupaten di NAD. Seluruh kota dan kabupaten itu akan saling berhubungan secara virtual melalui jaringan *wireless* dan tersambung ke Internet berbasis *Open Source Software*.